Analisis *Stakeholder* Pengelolaan Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala Berbasis Perhutanan Sosial di Desa Ketenger, Kabupaten Banyumas

Nur Azizurohman[1*], Titik Ekowati[2], Frida Purwanti[3]
[1-2]Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
[3]Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : *N.azizurohman@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada
Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026
Page: 7108-7117

DOI:
https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4846

Article History:
Received: Agustus 06, 2026
Revised: September 13, 2026
Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract *: Ecotourism management in state forest areas under the Social Forestry scheme involves numerous stakeholders with diverse interests and levels of influence, making an understanding of each party's role essential for sustainable management. This study analyzes stakeholders and their roles in managing the Curug Bayan and Curug Jenggala ecotourism sites based on Social Forestry in Ketenger Village, Banyumas Regency. The research was conducted from January to February 2026, with key informants selected purposively and expanded through snowball sampling. Data were collected through interviews, observations, and document review, then analyzed using stakeholder analysis combining the descriptive approach of Reed et al. (2009) with the interest–influence matrix of Ackermann and Eden (2011). The results identified 15 stakeholders from government agencies, state-owned enterprises, local communities, NGOs, higher education, businesses, and tourists. The key players were Balai PS Yogyakarta, Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, LMDH Gempita, and KMP Mitra Jenggala, whereas context setters, subjects, and the crowd acted as supporters, beneficiaries, or parties with limited involvement. These findings underscore the importance of collaboration and clear role allocation among actors, including through multi-stakeholder institutions, to sustain ecotourism management.*

Keywords : *Stakeholder Analysis; Ecotourism; Social Forestry; Multi-Stakeholder Cooperative; Banyumas*

Abstrak : Pengelolaan ekowisata di kawasan hutan negara melalui skema Perhutanan Sosial melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan dan pengaruh yang beragam, sehingga pemahaman peran masing-masing pihak penting bagi keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ini menganalisis *stakeholder* dan perannya dalam pengelolaan Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala berbasis Perhutanan Sosial di Desa Ketenger, Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan pada Januari–Februari 2026 dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive* dan diperluas melalui *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen, lalu dianalisis dengan analisis *stakeholder* yang menggabungkan pendekatan deskriptif Reed *et al.,* (2009) dan matriks kepentingan–pengaruh Ackermann dan Eden (2011). Hasil menunjukkan terdapat 15 *stakeholder* dari unsur pemerintah, BUMN, masyarakat lokal, LSM, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan wisatawan. *Key player* adalah Balai PS Yogyakarta,

Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, LMDH Gempita, dan KMP Mitra Jenggala, sedangkan *context setter*, *subject*, dan *crowd* berperan sebagai pendukung, penerima manfaat, atau pihak dengan keterlibatan terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antaraktor, termasuk melalui kelembagaan multipihak, untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

Kata Kunci : Analisis *Stakeholder*; Ekowisata; Perhutanan Sosial; Koperasi Multi Pihak; Banyumas

PENDAHULUAN

Pemerintah menempatkan pariwisata dalam dokumen RPJMN 2025–2029 sebagai salah satu penggerak ekonomi yang ingin diperbesar kontribusinya. Porsi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dipatok naik dari 3,6% pada 2022 menjadi sekitar 4,9–5% pada 2029. Pembangunan pariwisata sendiri masuk dalam prioritas nasional ketiga, dengan arah menciptakan nilai tambah dan daya saing melalui pengembangan destinasi prioritas maupun destinasi rintisan yang berkualitas dan berkelanjutan (Bappenas, 2024). Target lain yang menyertainya cukup besar: devisa USD 32–39,4 miliar, 20–23,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan belanja rata-rata USD 1.600–1.670 per kunjungan, serta penyerapan sekitar 29 juta tenaga kerja dan posisi 20 besar dunia pada *Travel and Tourism Development Index* (Bappenas, 2024; Kemenparekraf, 2025). Selain wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan domestik juga dipandang penting untuk menjaga ketahanan industri pariwisata di daerah.

Daya tarik wisata Indonesia tidak hanya berada di destinasi konvensional. Banyak lanskap alam yang menarik justru terletak di dalam kawasan hutan negara. Persoalannya, mengelola ekowisata di kawasan semacam ini tidak sesederhana membuka objek wisata di lahan umum, sebab pemanfaatannya terikat pada peraturan dan prinsip tata kelola kehutanan. Menurut Dewi *et al.*, (2016), pengelolaan hutan di Indonesia bergeser dari pola yang bertumpu pada negara (*state based*), terutama pada masa Orde Baru, menuju pola yang melibatkan masyarakat (*community based*). Pendekatan inilah yang dikenal sebagai *community forestry* atau kehutanan masyarakat.

Perhutanan Sosial lahir dari pergeseran paradigma tersebut. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah membuka akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan demi meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan kelestarian hutan (Kementerian LHK, 2021; Sabar *et al.*, 2022). Sabar *et al.*, (2022) menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah hutan yang tetap lestari secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam praktiknya, masyarakat sekitar hutan dapat menjalankan kegiatan produktif seperti memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, atau mengembangkan usaha ekowisata yang bertumpu pada kearifan lokal.

Sampai saat ini, akses pengelolaan atas kawasan hutan negara seluas 8.323.671,15 ha telah diberikan kepada 11.065 kelompok masyarakat pemegang persetujuan. Di Jawa Tengah, 161.750,46 ha telah didistribusikan kepada 470 kelompok dengan 49.140 kepala keluarga sebagai penerima manfaat (Kementerian Kehutanan, 2025a). Salah satu pemegang persetujuan tersebut adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gempita di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan SK.4831/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2020 tertanggal 14 Agustus 2020. Areal yang boleh dikelola LMDH Gempita mencapai 275,21 ha, dan di dalamnya terdapat dua objek ekowisata yang sudah berjalan dan memberi manfaat bagi warga sekitar, yakni Curug Jenggala dan Curug Bayan. Seiring ramainya wisata alam di kawasan Baturraden, kedua curug ini dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang legal dan tertata.

Meski demikian, mengelola ekowisata di kawasan hutan negara menempatkan masyarakat pada situasi tata kelola yang rumit. Status kawasan menuntut agar setiap pemanfaatan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi ekologis hutan. De Zoysa (2022) memandang tata kelola ekowisata berbasis hutan sebagai persoalan struktur kelembagaan, keterlibatan para pihak, akuntabilitas, dan transparansi. Samal dan Dash (2023) menambahkan

bahwa pengelolaan perlu menyelaraskan manfaat ekonomi bagi warga dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Karena itu, LMDH Gempita dituntut memiliki kapasitas tata kelola yang memadai, mulai dari perencanaan kegiatan, penguatan kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, pengaturan pemanfaatan, hingga pengendalian dampak aktivitas wisata (De Zoysa, 2022; Samal & Dash, 2023; Wiratno *et al.*, 2022).

Pengelolaan kedua curug itu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan, kewenangan, dan pengaruh yang tidak sama. Zhang *et al.*, (2022) menyebut interaksi antarpemangku kepentingan dan keterkaitan sistem sosial-lingkungan sebagai sumber kompleksitas pengelolaan pariwisata di kawasan lindung. Hasil serupa dilaporkan Meng *et al.*, (2022) serta Dong dan Nguyen (2023): perbedaan kepentingan antar-*stakeholder* ikut menentukan apakah ekowisata dapat berkelanjutan. Artinya, dibutuhkan hubungan kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara proporsional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis Perhutanan Sosial, termasuk pengembangan ekowisata oleh warga, masih terbentur keterbatasan modal serta kemampuan manajerial dan teknis pengelola (Budi, 2024). Keberhasilan program ini juga sangat dipengaruhi kualitas kolaborasi antar-*stakeholder*; tanpa koordinasi yang kuat dan pembagian peran yang jelas, keberlanjutan program mudah terhambat (Hastanti & Raharjo, 2021).

LMDH Gempita tidak mengelola ekowisata sendirian. Pada tingkat teknis, pengelolaan dijalankan secara partisipatif melalui wadah bersama bernama Koperasi Multi Pihak (KMP) Mitra Jenggala. Koperasi ini merupakan inovasi tata kelola yang menggandeng berbagai pemangku kepentingan, dengan harapan kolaborasi menjadi lebih kuat, pembagian peran lebih terang, dan pengelolaan ekowisata lebih berkelanjutan. Untuk memahami hubungan antaraktor tersebut, penelitian ini bertumpu pada beberapa kerangka teoretis. *Stakeholder* dipahami sebagai individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi maupun terdampak oleh suatu kegiatan (Clarkson, 1995), dan analisisnya berguna untuk menentukan siapa yang perlu dilibatkan serta dengan cara apa (Reed *et al.*, 2009). Pemetaan menurut tingkat kepentingan dan pengaruh dapat dilakukan lewat matriks *stakeholder grid* (Ackermann & Eden, 2011).

Sisi kelembagaan, kolaborasi antarpihak dalam perencanaan pariwisata berbasis masyarakat dibahas oleh Jamal dan Getz (1995), sedangkan Bramwell dan Lane (2011) menyoroti tata kelola pariwisata dalam kaitannya dengan keberlanjutan. Prinsip ekowisata yang menuntut manfaat bagi konservasi sekaligus pemberdayaan warga lokal merujuk pada Scheyvens (1999), dan tinjauan atas hasil kehutanan masyarakat dapat dilihat pada Maryudi *et al.* (2012). Berdasarkan dari uraian di atas, pengelolaan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud bila pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha bersinergi. Oleh sebab itu, peran masing-masing pihak dalam mendukung kelancaran pengelolaan perlu dianalisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis *stakeholder* beserta perannya dalam pengelolaan ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala berbasis Perhutanan Sosial di Desa Ketenger, Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala, Desa Ketenger, yang dikelola berdasarkan Persetujuan Perhutanan Sosial oleh LMDH Gempita, selama Januari hingga Februari 2026. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive) karena inisiatif LMDH Gempita membentuk KMP Mitra Jenggala, penerapan pengelolaan kolaboratif berbasis Perhutanan Sosial, serta aksesibilitas dan keterlibatan aktif masyarakat. Penentuan informan menggunakan teknik nonprobabilitas dengan pendekatan purposive atau purposeful sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kekayaan informasi, pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan ekowisata (Patton, 2002; Sugiyono, 2024). Informan kunci (key informants) dipilih untuk memperoleh informasi mendalam dan relevan sesuai tujuan penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Key informant* pada analisis *stakeholder* pengelolaan ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala berbasis Perhutanan Sosial

No	Instansi/*Stakeholder*	Jumlah Responden	Keterangan

1	Perum Perhutani	1	Memahami regulasi serta manfaat ekologis pengelolaan ekowisata
2	Balai PS Yogyakarta	1	Memahami kebijakan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial
3	LMDH Gempita	1	Mengetahui latar belakang lahirnya pengelolaan ekowisata
4	KMP Mitra Jenggala	1	Mengetahui mekanisme pengelolaan serta manfaat ekonomi dan sosialnya
5	Pemerintah Desa Ketenger	1	Memahami manfaat sosial dan ekonomi ekowisata bagi desa
	Jumlah	5	

Sumber: Data primer diolah (2026)

Informan tambahan ditentukan menggunakan teknik snowball sampling, yaitu perekrutan informan secara bertahap melalui rekomendasi informan sebelumnya (Sugiyono, 2024). Teknik ini sesuai untuk menjangkau kelompok yang sulit diakses melalui jaringan sosial informan awal serta dalam konteks masyarakat dengan hubungan antarindividu yang erat (Goodman, 2011; Sadler et al., 2010). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan tambahan serta observasi langsung di lokasi ekowisata, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen persetujuan Perhutanan Sosial, dan dokumen kelembagaan KMP Mitra Jenggala. Seluruh data digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan, pengaruh, dan peran setiap stakeholder.

Analisis data menggunakan metode analisis stakeholder yang menggabungkan pendekatan deskriptif Reed et al. (2009) dan matriks kepentingan–pengaruh dari Ackermann dan Eden (2011). Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi stakeholder yang memengaruhi atau terdampak oleh kebijakan dan pengelolaan ekowisata (Hidayat et al., 2020), pengelompokan berdasarkan kepentingan (interest) dan pengaruh (power), serta deskripsi peran berdasarkan dokumen dan hasil wawancara. Kepentingan dinilai melalui lima indikator, yaitu keterlibatan, manfaat pengelolaan, sumber daya yang disediakan, prioritas pengelolaan, dan ketergantungan terhadap sumber daya (Nurkhalis et al., 2018). Pengaruh dinilai berdasarkan aturan atau kebijakan, peran dan partisipasi, kemampuan berinteraksi dan memengaruhi, kewenangan pengelolaan, serta kapasitas sumber daya. Skor rata-rata setiap aktor kemudian dipetakan ke dalam empat kuadran stakeholder grid menggunakan nilai batas 2,5 sebagai titik tengah skala penilaian (Ackermann & Eden, 2011). Selanjutnya, peran dan kontribusi setiap stakeholder dianalisis dengan membandingkan tugas pokok dan fungsi dalam dokumen resmi dengan pelaksanaannya di lapangan melalui analisis deskriptif (Widodo et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Ekowisata

Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala berada di areal Perhutanan Sosial skema Kemitraan Kehutanan yang dipegang LMDH Gempita, sementara operasional wisatanya dijalankan KMP Mitra Jenggala. Koperasi ini tumbuh dari perkembangan kelembagaan LMDH Gempita yang telah mengantongi Persetujuan Perhutanan Sosial seluas 275,21 ha di Desa Ketenger. Legalitasnya diperoleh melalui Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 September 2023 dan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. KMP Mitra Jenggala dibentuk sebagai wadah ekonomi bagi LMDH Gempita dan pihak lain yang sepaham, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan warga sekitar lewat pemanfaatan sumber daya lokal, terutama pariwisata berbasis alam. Menurut Purnomo selaku ketua koperasi, bentuk koperasi dipilih karena nilai dan fungsinya: ia sejalan dengan semangat gotong royong dan mampu menampung kepentingan bersama. Model multipihak memungkinkan anggota berperan sekaligus sebagai pemilik, pengguna, dan pelaku usaha sehingga manfaat terbagi lebih merata.

Perkembangan ini dapat dibaca sebagai proses pembelajaran kelembagaan, ketika aktor lokal berangsur-angsur menyesuaikan struktur organisasi dan praktik pengelolaan agar sanggup menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Wulandari & Inoue, 2018). Pendekatan

kolaboratif dalam pengelolaan hutan dinilai mampu membagi peran dan manfaat dengan lebih seimbang, sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bisa dicapai bersamaan (Maryudi *et al.*, 2012). Kegiatan utama koperasi berfokus pada usaha berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan, terutama pengelolaan wisata Curug Jenggala dan Curug Bayan. Orientasi ini sejalan dengan prinsip ekowisata yang tidak berhenti pada rekreasi, tetapi juga menyumbang bagi konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal (Scheyvens, 1999).

Identifikasi *Stakeholder*

Wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan serta observasi selama penelitian menghasilkan daftar *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala. Daftar tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil identifikasi dan keterlibatan *stakeholder*

No	Asal Stakeholder	Stakeholder
1.	Instansi Pemerintah	Balai PS Yogyakarta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah CDK Wilayah VI Jawa Tengah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Banyumas Pemerintah Desa Ketenger
2.	Badan Usaha Milik Negara	Perum Perhutani KPH Banyumas Timur PLTA Ketenger (PLN)
3.	Masyarakat Lokal	LMDH Gempita KMP Mitra Jenggala Masyarakat Desa Ketenger
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Burung Indonesia
5.	Akademisi/Perguruan Tinggi	Universitas Terbuka Purwokerto
6.	Pelaku Usaha	UMKM kuliner UMKM jasa fotografi
7.	Wisatawan	Wisatawan

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pengelolaan kedua curug melibatkan unsur pemerintah, BUMN, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan wisatawan. Keragaman ini menunjukkan bahwa ekowisata berbasis Perhutanan Sosial memerlukan kolaborasi antaraktor yang kepentingan dan tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Unsur pemerintah, terdapat Balai Perhutanan Sosial (PS) Yogyakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, serta Pemerintah Desa Ketenger. Balai PS Yogyakarta melaksanakan kebijakan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Dinas Kehutanan Provinsi dan CDK Wilayah VI mengurus bidang kehutanan di tingkat provinsi, Dinporabudpar menangani pembangunan pariwisata daerah, dan Pemerintah Desa Ketenger menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk yang menyangkut pengembangan wisata di wilayahnya.

Dua pihak berstatus BUMN ikut terlibat: Perum Perhutani KPH Banyumas Timur yang mengelola kawasan hutan negara di lokasi penelitian, dan PLTA Ketenger milik PT PLN (Persero) yang memanfaatkan sumber daya air di lereng Gunung Slamet. Keduanya bersentuhan dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan ekowisata. Unsur masyarakat lokal terdiri atas LMDH Gempita, KMP Mitra Jenggala, dan masyarakat Desa Ketenger. LMDH Gempita memegang Persetujuan Perhutanan Sosial di lokasi, KMP Mitra Jenggala mengelola dan mengembangkan ekowisata pada areal itu, sedangkan warga Desa Ketenger adalah komunitas yang hidup berdampingan langsung dengan aktivitas wisata.

Burung Indonesia mewakili lembaga swadaya masyarakat. Organisasi ini bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan sebagai mitra nasional BirdLife International ia memiliki kaitan dengan upaya konservasi yang menopang keberlanjutan ekowisata. Dari kalangan akademisi, hadir Universitas Terbuka Purwokerto yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di Banyumas dan sekitarnya; lembaga ini berpotensi membantu penguatan kapasitas pengelola melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pelaku usaha mencakup UMKM kuliner yang menyediakan makanan dan minuman serta UMKM jasa fotografi yang menawarkan dokumentasi wisata. Keduanya membuka peluang pendapatan bagi warga lokal dengan melayani kebutuhan pengunjung. Terakhir, wisatawan adalah pengguna langsung layanan dan fasilitas ekowisata. Mereka berkontribusi secara ekonomi lewat tiket masuk dan pembelian produk atau jasa, dan kepuasan serta persepsi mereka turut membentuk citra dan daya saing destinasi dalam jangka panjang.

Klasifikasi dan Peran *Stakeholder*

Para *stakeholder* yang sudah teridentifikasi kemudian dikelompokkan menurut tingkat kepentingan dan pengaruhnya (Hidayat *et al.*, 2020) dengan matriks Ackermann dan Eden (2011). Skor kepentingan dan pengaruh tiap aktor disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai kuantifikasi kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

No	*Stakeholder*	Kepentingan	Pengaruh	Kategori
1.	Balai PS Yogyakarta	4,8	4,2	*Key player*
2.	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	2,4	3,4	*Context setter*
3.	CDK Wilayah VI Jawa Tengah	2,4	3,2	*Context setter*
4.	Perum Perhutani KPH Banyumas Timur	4,4	4,0	*Key player*
5.	Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kab. Banyumas	2,0	2,8	*Context setter*
6.	Pemerintah Desa Ketenger	1,8	3,0	*Context setter*
7.	LMDH Gempita	4,6	3,6	*Key player*
8.	KMP Mitra Jenggala	4,8	3,6	*Key player*
9.	LSM Burung Indonesia	2,6	2,2	*Subject*
10.	Universitas Terbuka Purwokerto	2,4	1,6	*Crowd*
11.	PLTA Ketenger (PLN)	2,0	1,2	*Crowd*
12.	UMKM kuliner	4,0	2,0	*Subject*
13.	UMKM jasa fotografi	4,2	2,0	*Subject*
14.	Masyarakat Desa Ketenger	3,6	1,6	*Subject*
15.	Wisatawan	2,8	1,2	*Subject*

Sumber: Data primer diolah (2026)

Skor-skor tersebut selanjutnya dipetakan ke dalam matriks kepentingan–pengaruh (*stakeholder grid*) seperti terlihat pada Gambar 1. Posisi dalam matriks menunjukkan kedudukan strategis dan peran masing-masing aktor.

Gambar 1. Matriks *stakeholder grid* pengelolaan Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala

	Kepentingan rendah (< 2,5)	**Kepentingan tinggi (≥ 2,5)**
Pengaruh tinggi (≥ 2,5)	***Context Setter*** 2. Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah 3. CDK Wilayah VI Jawa Tengah 5. Dinporabudpar Kab. Banyumas	***Key Player*** 1. Balai PS Yogyakarta 4. Perhutani KPH Banyumas Timur 7. LMDH Gempita

	6. Pemerintah Desa Ketenger	8. KMP Mitra Jenggala
Pengaruh rendah (< 2,5)	***Crowd*** 10. Universitas Terbuka Purwokerto 11. PLTA Ketenger (PLN)	***Subject*** 9. Burung Indonesia 12. UMKM kuliner 13. UMKM jasa fotografi 14. Masyarakat Desa Ketenger 15. Wisatawan

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan matriks tersebut, *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata oleh KMP Mitra Jenggala dibagi menjadi empat kelompok berikut.

Subject

Kelompok *subject* punya kepentingan tinggi tetapi pengaruh terhadap pengambilan keputusan terbatas. Anggotanya adalah masyarakat Desa Ketenger, UMKM kuliner, UMKM jasa fotografi, LSM Burung Indonesia, dan wisatawan. Masyarakat Desa Ketenger merasakan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari kegiatan wisata. Seluruh tenaga kerja pengelola berasal dari warga lokal, dan peluang ekonomi lain terbuka lewat perdagangan serta jasa parkir. UMKM kuliner dan jasa fotografi menggantungkan usahanya pada kunjungan wisatawan; layanan mereka menambah kenyamanan pengunjung sekaligus menjadi sumber pendapatan warga. Burung Indonesia bergerak di konservasi burung dan habitatnya, dan mendampingi KMP Mitra Jenggala agar habitat tetap terjaga serta dampak pembangunan sarana wisata terhadap lingkungan dapat ditekan. Wisatawan memengaruhi permintaan melalui jumlah kunjungan, preferensi, dan pola belanja, dan kepuasan mereka ikut menentukan citra serta daya saing destinasi. Terbatasnya pengaruh kelompok ini dalam pengambilan keputusan mengisyaratkan perlunya mekanisme partisipatif agar kepentingan mereka tertampung dalam pengelolaan ekowisata.

Key Player

Kelompok *key player* memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi, yaitu Balai PS Yogyakarta, Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, LMDH Gempita, dan KMP Mitra Jenggala. Balai PS Yogyakarta menjalankan kebijakan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025, perannya meliputi fasilitasi perencanaan, bantuan ekonomi produktif, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan (Kementerian Kehutanan, 2025b). Perum Perhutani KPH Banyumas Timur mengelola kawasan hutan negara di lokasi penelitian melalui kemitraan kehutanan dengan LMDH Gempita; keduanya berbagi peran dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan hutan sesuai kesepakatan kerja sama.

LMDH Gempita adalah pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial yang menjadi dasar hukum pemanfaatan kawasan melalui skema Kemitraan Kehutanan. Lembaga ini mewakili masyarakat, mengorganisasi anggota, dan menjembatani kebijakan kehutanan dengan pelaksanaan di tingkat tapak. KMP Mitra Jenggala bertanggung jawab atas operasional ekowisata: tiket, layanan pengunjung, aktivitas wisata, serta penyediaan dan perawatan fasilitas. Koperasi ini juga mengelola penerimaan, pencatatan keuangan, dan pembagian manfaat dari kegiatan wisata. Keempat aktor saling melengkapi. Balai PS Yogyakarta dan Perhutani memegang fungsi kebijakan dan pengelolaan kehutanan, sedangkan LMDH Gempita dan KMP Mitra Jenggala mengorganisasi masyarakat dan menjalankan operasional ekowisata.

Context Setter

Kelompok *context setter* berpengaruh terhadap kebijakan tetapi tidak terlibat langsung dalam operasional wisata. Anggotanya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, CDK Wilayah VI Jawa Tengah, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Desa Ketenger. Dinas Kehutanan Provinsi dan CDK Wilayah VI menjalankan pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kehutanan sesuai kewenangannya. Menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021, dukungan pemerintah daerah dapat berupa program kehutanan, penyuluhan, dan penguatan kapasitas masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan pengelolaan kawasan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Dinporabudpar Kabupaten Banyumas mendukung pengembangan pariwisata melalui promosi, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan peningkatan kapasitas pengelola, meskipun pengelolaan kawasan hutan tetap mengikuti kewenangan bidang kehutanan. Pemerintah Desa Ketenger berwenang mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 (Kementerian Dalam Negeri, 2016), dengan peran memfasilitasi administrasi, mendukung kelembagaan, dan mengoordinasikan upaya agar LMDH Gempita dan KMP Mitra Jenggala dapat memenuhi persyaratan pengelolaan. Walaupun tidak terlibat dalam kegiatan harian, kelompok ini dapat membentuk iklim kebijakan dan dukungan kelembagaan yang menentukan keberlanjutan ekowisata.

Crowd

Kelompok *crowd* memiliki kepentingan dan pengaruh yang relatif rendah, yaitu Universitas Terbuka Purwokerto dan PLTA Ketenger yang dikelola PT PLN (Persero). Universitas Terbuka berpotensi berkontribusi lewat penelitian dan pengabdian masyarakat. Keterlibatannya belum intensif, namun pernah berupa pendampingan dan bantuan perbaikan jalan menuju Curug Jenggala. PLTA Ketenger berfokus pada pembangkitan listrik tenaga air sehingga tidak terlibat langsung dalam operasional wisata; kaitannya dengan ekowisata terutama muncul karena pemanfaatan sumber daya alam di wilayah yang saling bersinggungan secara spasial. Prioritas keterlibatan kelompok ini memang relatif rendah, tetapi perannya bisa membesar jika dinamika pengelolaan atau tingkat keterlibatannya berubah. Secara keseluruhan, pemetaan memperlihatkan bahwa pengelolaan Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala melibatkan aktor dengan kewenangan, pengaruh, dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Keberlanjutan pengelolaan banyak ditentukan oleh bagaimana peran dibagi serta bagaimana hubungan dan kolaborasi antaraktor dibangun (Clarkson, 1995; Jamal & Getz, 1995; Bramwell & Lane, 2011).

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekowisata Curug Bayan dan Curug Jenggala dikelola melalui KMP Mitra Jenggala, sebuah kelembagaan ekonomi multipihak yang tumbuh dari perkembangan kelembagaan LMDH Gempita sebagai pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial. KMP berperan sebagai pelaksana operasional wisata dengan pengambilan keputusan yang partisipatif dan pembagian manfaat yang proporsional bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Analisis menunjukkan lima belas *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Kelompok *key player* terdiri atas Balai PS Yogyakarta dan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, yang berperan dalam kebijakan dan legitimasi kelembagaan, serta LMDH Gempita dan KMP Mitra Jenggala sebagai penentu dan pelaksana kebijakan operasional. Kelompok *context setter* terdiri atas Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, CDK Wilayah VI, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, dan Pemerintah Desa Ketenger. Masyarakat Desa Ketenger, pelaku UMKM, wisatawan, dan Burung Indonesia termasuk kelompok *subject*, sedangkan Universitas Terbuka Purwokerto dan PLTA Ketenger termasuk kelompok *crowd*.

Selanjutnya untuk saran, pertama, pengelola perlu menyediakan ruang partisipasi yang lebih formal, misalnya forum rutin, bagi kelompok *subject* agar masukan warga, pelaku usaha, dan wisatawan ikut memengaruhi keputusan. Kedua, koordinasi dengan kelompok *context setter* sebaiknya diperkuat, khususnya dalam promosi, peningkatan kapasitas pengelola, dan pemenuhan persyaratan administratif. Ketiga, keterlibatan Universitas Terbuka Purwokerto dan Burung Indonesia dapat dipertegas melalui kerja sama tertulis di bidang pendampingan, penelitian, dan konservasi, sedangkan koordinasi pemanfaatan ruang dengan PLTA Ketenger perlu dijaga. Keempat, penelitian lanjutan dapat menelaah pola relasi antaraktor dan indikator keberlanjutan pengelolaan secara lebih mendalam

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LMDH Gempita, KMP Mitra Jenggala, Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, Balai PS Yogyakarta, Pemerintah Desa Ketenger, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan moril maupun materil selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Ackermann, F., & Eden, C. (2011). Strategic management of stakeholders: Theory and practice. *Long Range Planning, 44*(3), 179–196. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.08.001

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Bappenas.

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism, 19*(4–5), 411–421. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765

Budi. (2024). *Keberlanjutan pengelolaan hutan negara oleh masyarakat melalui perhutanan sosial*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kehutanan.

Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *The Academy of Management Review, 20*(1), 92–117. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271994

De Zoysa, M. (2022). Forest-based ecotourism in Sri Lanka: A review on state of governance, livelihoods, and forest conservation outcomes. *Journal of Sustainable Forestry, 41*(3–5), 413–439. https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1943450

Dewi, N. I., Awang, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. (2016). Pengembangan ekowisata kawasan hutan dengan skema hutan kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manusia dan Lingkungan, 24*(2), 95–102.

Dong, X. D., & Nguyen, T. Q. T. (2023). Power, community involvement, and sustainability of tourism destinations. *Tourist Studies, 23*(1). https://doi.org/10.1177/14687976221144335

Goodman, L. A. (2011). Comment: On respondent-driven sampling and snowball sampling in hard-to-reach populations and snowball sampling not in hard-to-reach populations. *Sociological Methodology, 41*(1), 347–353. https://doi.org/10.1111/j.1467-9531.2011.01242.x

Hastanti, B. W., & Raharjo, S. A. S. (2021). Analisis para pihak pada implementasi program perhutanan sosial di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Jurnal WASIAN, 8*(1), 11–23.

Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis stakeholder pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Jember. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 3*(2), 179–189.

Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research, 22*(1), 186–204. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa*. JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025a). *Daftar capaian perhutanan sosial*. https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial*. JDIH Kementerian Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2025). *Rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2025–2029*. Kemenparekraf.

Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi Movuh, M. C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., & Krott, M. (2012). Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics, 14*(1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017

Meng, J., Long, Y., & Shi, L. (2022). Stakeholders' evolutionary relationship analysis of China's national park ecotourism development. *Journal of Environmental Management, 316*, Article 115188. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115188

Nurkhalis, N., Arief, H., & Sunarminto, T. (2018). Analisis stakeholder's dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan. *Jurnal Pariwisata, 5*(2), 107–119. https://doi.org/10.31311/par.v5i2.3811

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah*. JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management, 90*(5), 1933–1949. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Sabar, A., Dassir, M., & Ita, N. E. S. (2022). Modal sosial masyarakat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuasia, 8*(1), 94–101.

Sadler, G. R., Lee, H. C., Lim, R. S., & Fullerton, J. (2010). Recruitment of hard-to-reach population subgroups via adaptations of the snowball sampling strategy. *Nursing & Health Sciences, 12*(3), 369–374. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2010.00541.x

Samal, R., & Dash, M. (2023). Ecotourism, biodiversity conservation and livelihoods: Understanding the convergence and divergence. *International Journal of Geoheritage and Parks, 11*(1), 1–20. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2022.11.001

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management, 20*(2), 245–249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Widodo, L. M., Soekmadi, R., & Arifin, S. H. (2018). Analisis stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8*(1), 55–61.

Wiratno, W., Withaningsih, S., Gunawan, B., & Iskandar, J. (2022). Ecotourism as a resource sharing strategy: Case study of community-based ecotourism at the Tangkahan Buffer Zone of Leuser National Park, Langkat District, North Sumatra, Indonesia. *Sustainability, 14*(6), Article 3399. https://doi.org/10.3390/su14063399

Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). The importance of social learning for the development of community based forest management in Indonesia: The case of HKm. *Small-scale Forestry, 17*(3), 361–376. https://doi.org/10.1007/s11842-018-9392-7

Zhang, X., Zhong, L., & Yu, H. (2022). Sustainability assessment of tourism in protected areas: A relational perspective. *Global Ecology and Conservation, 35*, Article e02074. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02074